

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) merupakan salah satu persoalan lingkungan global yang paling mendesak saat ini. Fenomena ini terjadi ketika laju penangkapan ikan melampaui kemampuan populasi ikan untuk berkembang biak dan memulihkan diri secara alami, sehingga stok di laut terus menyusut dari waktu ke waktu. Didorong oleh meningkatnya permintaan pangan dunia, kemajuan teknologi penangkapan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan perikanan, eksploitasi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan spesies target tetapi juga mengganggu keseimbangan rantai makanan dan keanekaragaman hayati laut secara keseluruhan. Karena lautan menjadi sumber protein utama bagi miliaran orang dan menopang penghidupan jutaan nelayan, *overfishing* menjelma menjadi ancaman lintas batas yang menautkan isu ekologi dengan ketahanan pangan, ekonomi, dan keadilan sosial.

Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumber daya laut terus meningkat akibat intensifikasi aktivitas perikanan global. Laporan *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2024* mencatat bahwa produksi perikanan dan akuakultur dunia mencapai 223,2 juta ton pada tahun 2022, meningkat sebesar 4,4% dibandingkan tahun 2020, dengan sektor perikanan tangkap menyumbang 92,3 juta ton (FAO, 2024). Peningkatan produksi tersebut diikuti oleh menurunnya proporsi

stok ikan laut yang masih berada pada tingkat eksploitasi berkelanjutan secara biologis menjadi hanya 62,3% pada tahun 2021, turun 2,3% dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak stok ikan dieksploitasi melebihi kapasitas regenerasinya sehingga memicu penurunan populasi dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut.

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep *Tragedy of The commons* yang dikemukakan oleh Hardin (1968), yaitu keadaan ketika sumber daya yang dimiliki bersama (*common-pool resources*) cenderung dieksploitasi secara berlebihan karena setiap individu atau kelompok berupaya memaksimalkan keuntungan pribadi, sementara biaya kerusakan sumber daya ditanggung secara kolektif. Dalam konteks perikanan laut, sifat laut sebagai sumber daya bersama mendorong negara maupun pelaku industri untuk terus meningkatkan aktivitas penangkapan ikan demi memperoleh manfaat ekonomi, tanpa insentif yang memadai untuk membatasi eksploitasi. Akibatnya, tekanan terhadap stok ikan terus meningkat dan memperbesar risiko terjadinya *overfishing*. Situasi ini semakin diperparah oleh meningkatnya konsumsi pangan laut dunia, yang naik dari 9,1 kg per kapita pada tahun 1961 menjadi 20,7 kg pada tahun 2022 (FAO, 2024). Apabila eksploitasi tersebut tidak dikendalikan melalui pengelolaan yang mampu mengatasi persoalan *commons*, maka degradasi ekosistem laut akan semakin meluas dan mengancam ketahanan pangan jutaan masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan.

Karena penangkapan ikan berlebihan tidak mengenal batas wilayah negara persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara sendiri-sendiri,

melainkan menuntut koordinasi dan kerja sama antarnegara. Di sinilah konsep tata kelola lingkungan global (*Global Environmental Governance*) menjadi relevan. Secara umum, tata kelola lingkungan global merujuk pada keseluruhan aturan, institusi, perjanjian, dan aktor yang terlibat dalam mengatur serta merespons perubahan lingkungan yang bersifat lintas batas (Newell, 2008). Dalam pemahaman konvensional Hubungan Internasional, tata kelola semacam ini sering kali dipersempit menjadi studi tentang hukum lingkungan internasional dan rezim antarnegara yang dibentuk untuk melindungi sumber daya bersama atau *global commons* (Newell, 2008). Namun, Newell (2008) menegaskan bahwa tata kelola lingkungan kontemporer sesungguhnya lebih kompleks: ia tidak hanya melibatkan negara dan institusi internasional, tetapi juga aktor non-negara seperti perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku pasar yang turut membentuk pola pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam.

Overfishing sebagai isu lintas batas membuat masyarakat internasional membangun sejumlah mekanisme tata kelola. Kerangka hukum paling mendasar adalah Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*), yang mengatur hak dan kewajiban negara atas perairan laut, termasuk batas Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut dan pengelolaan laut lepas yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun. Kerangka ini diperkuat oleh *United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA) tahun 1995, yang mewajibkan semua organisasi pengelola perikanan untuk menilai dampak penangkapan terhadap stok ikan sasaran serta melindungi keanekaragaman hayati laut (Carmin et al., 2025). Pada tingkat lembaga, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO)

berperan menyusun pedoman dan praktik terbaik bagi pengelolaan perikanan, sementara *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) menjadi badan utama yang bertugas mengelola perikanan di sebagian besar laut lepas dengan mandat ganda, yaitu memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus konservasi jangka panjang stok ikan yang bermigrasi dan lintas wilayah (Carmine et al., 2025).

Keberadaan berbagai mekanisme tersebut belum cukup untuk menghentikan penangkapan ikan berlebihan, sehingga muncul tantangan serius dalam implementasinya. Evaluasi terbaru terhadap 16 RFMO menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan mereka hanya mencapai 45,5 dari 100, jauh di bawah skor "kasus terbaik" yang sebenarnya dapat dicapai (Carmine et al., 2025). Yang lebih mengkhawatirkan, rata-rata 56 persen stok ikan yang menjadi sasaran tangkap di wilayah konvensi RFMO tergolong telah dieksploitasi berlebihan atau bahkan kolaps, dan proporsi ini justru meningkat sejak UNFSA disepakati pada 1995 (Carmine et al., 2025). Carmine et al. (2025) bahkan menemukan bahwa skor kinerja pengelolaan RFMO tidak berkorelasi dengan hasil yang lebih baik di lapangan, yang menandakan bahwa kebijakan yang baik di atas kertas sering kali tidak diiringi oleh pemantauan, kepatuhan, dan penegakan yang efektif. Kesenjangan antara komitmen formal dan praktik nyata inilah yang menjadi inti persoalan: tata kelola lingkungan global untuk perikanan telah tersedia secara kelembagaan, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan, kepentingan ekonomi yang dominan, dan keterbatasan kapasitas pengawasan di laut lepas.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap krisis kelautan, media dokumenter menempati posisi yang strategis sebagai saluran yang menerjemahkan persoalan ilmiah dan kebijakan yang rumit menjadi narasi yang dapat diakses oleh khalayak awam. Salah satu produk media yang secara khusus mengangkat persoalan penangkapan ikan berlebihan ke hadapan audiens global adalah film dokumenter *Seaspiracy* yang dirilis melalui platform Netflix pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Ali Tabrizi (Tabrizi, 2021). Sebagai sebuah dokumenter berdurasi panjang yang ditayangkan pada layanan streaming dengan jangkauan lintas negara, *Seaspiracy* menjangkau jutaan penonton dalam waktu singkat sehingga turut membentuk wacana populer mengenai kondisi laut kontemporer. Film ini menelusuri beragam isu yang saling berkaitan dalam ekosistem industri perikanan global, mulai dari praktik penangkapan ikan dalam skala industri, persoalan tangkapan sampingan (*bycatch*) yang melibatkan spesies non-target seperti lumba-lumba, penyu, dan hiu, hingga dampak kumulatif aktivitas perikanan terhadap keseimbangan ekosistem laut (Tabrizi, 2021). Tidak berhenti pada dimensi ekologis, dokumenter ini juga merambah ranah kelembagaan dan ekonomi-politik dengan menyoroti mekanisme sertifikasi keberlanjutan, kredibilitas label produk perikanan, serta peran berbagai organisasi konservasi dan badan tata kelola yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya laut (Tabrizi, 2021).

Posisi *Seaspiracy* sebagai objek penelitian menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan kajian terhadap film dokumenter dalam studi politik dan hubungan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, disiplin Hubungan Internasional menunjukkan ketertarikan yang semakin besar terhadap

praktik dan representasi visual, baik sebagai imajinasi populer yang membentuk cara orang memahami dan bertindak di dunia maupun sebagai sarana untuk menyampaikan peristiwa empiris dan konsep abstrak (van Munster & Sylvest, 2015). Van Munster dan Sylvest (2015) berargumen bahwa film dokumenter perlu diperlakukan sebagai medium representasi yang khas dan signifikan, yang bergerak di antara fakta dan fiksi, edukasi dan hiburan, serta secara langsung turut campur dalam politik dengan mengklaim sebagian dari kebenaran dan realitas. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa dokumenter tidak sekadar menjadi jendela yang menampilkan realitas, melainkan menyusun representasi tingkat pertama menjadi interpretasi yang berfungsi sebagai sumber pengetahuan tersendiri mengenai politik global (van Munster & Sylvest, 2015).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji film dokumenter *Seaspiracy* maupun isu *overfishing* dari berbagai perspektif. Pertiwi et al. (2022), misalnya, menggunakan analisis semiotika John Fiske untuk menelaah representasi kerusakan ekosistem laut dalam film *Seaspiracy* dan menemukan bahwa film tersebut menampilkan berbagai bentuk eksploitasi sumber daya laut, seperti *overfishing*, pencemaran laut, dan praktik industri perikanan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Di sisi lain, berbagai penelitian mengenai framing media lingkungan umumnya berfokus pada bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap krisis ekologis, mendorong kesadaran lingkungan, serta memengaruhi dukungan terhadap kebijakan tertentu. Sementara itu, kajian mengenai *overfishing* lebih banyak menyoroti dampak eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan, keberlanjutan

ekosistem laut, serta tantangan pengelolaan sumber daya perikanan pada tingkat nasional maupun internasional.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek representasi media atau dampak lingkungan dari *overfishing* secara terpisah. Belum banyak kajian yang secara khusus menghubungkan representasi isu *overfishing* dalam film dokumenter dengan perspektif *Tragedy of The commons*. Padahal, isu eksploitasi sumber daya laut merupakan bagian dari tantangan lingkungan global yang memerlukan kerja sama lintas negara dan keterlibatan berbagai aktor dalam pengelolaannya. Dalam kerangka *Tragedy of The commons*, permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan wilayah *global commons*, termasuk laut lepas, dipahami sebagai isu yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan mekanisme tata kelola, norma, serta koordinasi internasional yang lebih luas (Speth & Haas, 2006).

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan baik dari sisi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hubungan Internasional melalui penerapan konsep *Tragedy of The commons* yang dikemukakan oleh Hardin (1968) dalam menganalisis representasi eksploitasi sumber daya laut pada film dokumenter *Seaspiracy*. Penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana media visual tidak hanya menggambarkan fenomena *overfishing* sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga merepresentasikan konflik kepentingan yang muncul akibat pemanfaatan sumber daya laut sebagai *common-pool resources*. Melalui perspektif tersebut,

eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut dipahami sebagai konsekuensi dari tindakan aktor-aktor yang mengejar keuntungan individu tanpa mempertimbangkan dampak kolektif terhadap keberlanjutan ekosistem laut (Hardin, 1968).

Dalam konteks tersebut, perspektif *Global Environmental Governance* digunakan sebagai landasan pendukung untuk memahami bahwa permasalahan *Tragedy of The commons* pada sumber daya laut memerlukan mekanisme tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, baik negara, organisasi internasional, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan *Global Environmental Governance* sebagai kerangka analisis utama, melainkan sebagai konteks yang menjelaskan pentingnya koordinasi dan pengelolaan bersama dalam mengatasi eksploitasi sumber daya laut. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat kajian mengenai peran media dalam Hubungan Internasional dengan menunjukkan bahwa film dokumenter tidak hanya merefleksikan realitas politik dan lingkungan, tetapi juga membentuk pemahaman publik terhadap isu-isu global serta mendorong munculnya perhatian terhadap persoalan pengelolaan sumber daya bersama (van Munster & Sylvest, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *overfishing* telah berkembang menjadi isu lingkungan global yang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya laut, tetapi juga menyangkut dinamika tata kelola lingkungan yang melibatkan berbagai aktor di tingkat internasional. Di sisi lain, film dokumenter sebagai media visual memiliki peran yang semakin signifikan

dalam membentuk pemahaman publik terhadap berbagai isu global melalui cara tertentu dalam merepresentasikan realitas. Meskipun demikian, keterkaitan antara representasi isu *overfishing* dalam film dokumenter dengan perspektif *Tragedy of The commons* masih belum banyak dikaji dalam penelitian Hubungan Internasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji bagaimana film *Seaspiracy* membingkai isu *overfishing* serta bagaimana representasi tersebut dapat dipahami dalam konteks tata kelola lingkungan global.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana film dokumenter *Seaspiracy* membingkai isu *overfishing* sebagai isu lingkungan global dalam perspektif *Tragedy of The commons*?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena eksploitasi sumber daya laut dan praktik *overfishing* yang direpresentasikan dalam film dokumenter *Seaspiracy*. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah menganalisis fenomena eksploitasi sumber daya laut yang ditampilkan dalam film *Seaspiracy* menggunakan perspektif *Tragedy of The commons*.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Hubungan Internasional yang menempatkan media sebagai aktor yang berperan dalam membentuk persepsi terhadap isu global. Melalui analisis terhadap film dokumenter *Seaspiracy*, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai media framing dalam merepresentasikan isu *overfishing*, sekaligus memperluas penerapan perspektif *Global Environmental Governance* dalam memahami bagaimana media membingkai *overfishing* sebagai ancaman lingkungan global serta merepresentasikan peran berbagai aktor dalam tata kelola lingkungan.

1.4.2 Kegunaan Praktis dan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman mengenai berbagai isu lingkungan yang berkembang di tingkat global serta bagaimana isu tersebut direpresentasikan melalui media. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sosial mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam, khususnya sumber daya laut, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih bertanggung jawab.

1.5. Kerangka Pemikiran Konseptual

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Penggunaan media film dokumenter seperti *Seaspiracy* menjadi salah satu sarana dalam merepresentasikan dan sekaligus membentuk pemahaman publik terhadap isu global, termasuk permasalahan *overfishing*. Dalam konteks komunikasi massa, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *agenda-setting* yang menyatakan bahwa media mampu mempengaruhi perhatian publik terhadap suatu isu melalui intensitas dan penekanan pemberitaan. McCombs dan Shaw (1972) pada tulisannya *The Agenda-Setting Function of Mass Media* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara isu yang diangkat oleh media dengan persepsi publik mengenai isu tersebut, dengan tingkat korelasi yang tinggi antara agenda media dan agenda publik. Dengan demikian, film *Seaspiracy* tidak hanya berperan sebagai media informasi, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk agenda publik dengan menempatkan isu *overfishing* sebagai persoalan penting dalam dinamika pengelolaan sumber daya laut global.

Kajian yang dilakukan oleh van Munster dan Sylvest (2015) mengenai film dokumenter dalam kajian Hubungan Internasional menyoroti bagaimana dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai media yang merepresentasikan realitas, tetapi juga sebagai medium yang secara aktif membentuk cara audiens memahami isu-isu global. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa film dokumenter memiliki kemampuan untuk mengintervensi politik internasional melalui penyusunan narasi,

visual, suara, dan fakta yang disajikan kepada audiens. Melalui konsep *arrangements of perceptibility*, van Munster dan Sylvest menunjukkan bahwa dokumenter dapat membentuk persepsi publik dengan cara menampilkan, menekankan, dan mengarahkan perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dari suatu isu internasional. Selain berfungsi sebagai sarana edukasi, dokumenter juga berperan dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran terhadap berbagai persoalan global. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa film dokumenter merupakan medium yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara masyarakat memahami realitas internasional, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen representasi sekaligus konstruksi terhadap isu-isu global yang diangkat dalam film.

Adapun film dokumenter *The End of the Line* yang disutradarai oleh Rupert Murray (2009), juga mengangkat isu *overfishing* sebagai krisis global yang ditandai dengan menurunnya stok ikan akibat eksploitasi berlebihan oleh industri perikanan modern. Dalam film tersebut dijelaskan bahwa perkembangan teknologi penangkapan, seperti penggunaan kapal skala besar dan alat tangkap yang masif, telah memungkinkan eksploitasi sumber daya laut dilakukan secara intensif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Di samping itu, tingginya permintaan pasar global terhadap produk perikanan serta adanya kebijakan subsidi pemerintah turut mendorong praktik penangkapan ikan secara berlebihan. Melalui pendekatan berbasis data ilmiah dan wawancara dengan para ahli, film ini menunjukkan bahwa *overfishing* tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan sistem ekonomi dan tata kelola global yang belum efektif. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa *overfishing* merupakan permasalahan multidimensional yang berdampak luas terhadap keberlanjutan ekosistem laut.

Penelitian yang dilakukan oleh Pardede *et al.* (2023) menganalisis kontroversi *overfishing* dalam film dokumenter *Seaspiracy* melalui pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa film ini menampilkan berbagai kontroversi terkait eksploitasi laut, seperti praktik *bycatch*, aktivitas industri perikanan, narasi mengenai penghentian konsumsi hewan laut, serta polemik mengenai sertifikasi keberlanjutan dari Marine Stewardship Council (MSC). Temuan tersebut menunjukkan bahwa film dokumenter dapat menjadi media yang merepresentasikan kritik terhadap praktik eksploitasi laut serta dampaknya terhadap ekosistem laut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pertiwi *et al.* (2022) merepresentasi kehancuran ekosistem laut menggunakan analisis semiotika John Fiske dalam film *Seaspiracy*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan gambaran kerusakan ekosistem laut melalui berbagai representasi visual dan naratif, seperti praktik *overfishing*, pencemaran laut, serta aktivitas industri perikanan skala besar yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa ideologi kapitalisme menjadi salah satu faktor yang mendorong eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan.

Lebih lanjut pada penelitian yang dilakukan oleh Carmine *et al.* (2025) mengevaluasi kinerja *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) sebagai regime internasional dalam pengelolaan perikanan di laut lepas (*high seas*) melalui pendekatan berbasis tata kelola dan konservasi lingkungan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun RFMO memiliki mandat untuk menjaga

keberlanjutan stok ikan dan melindungi ekosistem laut, sebagian besar organisasi tersebut masih gagal menjalankan fungsi konservasi secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata performa RFMO secara global masih rendah, sementara sekitar 56% stok ikan yang berada di wilayah pengelolaan RFMO telah mengalami kondisi *overexploited* atau bahkan kolaps. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingginya aktivitas penangkapan ikan industri, lemahnya perlindungan kawasan laut, rendahnya transparansi, serta kurang efektifnya pengawasan terhadap praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing) menjadi faktor utama yang memperburuk eksploitasi sumber daya laut di laut lepas. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa berbagai kebijakan konservasi yang diterapkan RFMO sering kali hanya bersifat administratif dan belum mampu menghasilkan perlindungan nyata terhadap biodiversitas laut. Melalui analisis tersebut, Carmine et al. (2025) menekankan pentingnya pembentukan kawasan konservasi laut, pengurangan kuota tangkap saat terjadi *overfishing*, serta penguatan pengawasan internasional sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perikanan global.

Sedangkan pada artikel penelitian yang ditulis oleh Duplisea et al. (2025) membahas bahwa dampak *overfishing* tidak berhenti pada saat eksploitasi terjadi, melainkan meninggalkan efek jangka panjang yang terus memengaruhi kondisi stok ikan dan sistem pengelolaan perikanan. Konsep *ghosts of overfishing past* yang diperkenalkan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemulihan stok ikan yang diukur melalui biomassa belum tentu mencerminkan kondisi ekosistem yang sebenarnya, karena indikator tersebut tidak mampu menggambarkan perubahan

struktural dalam populasi ikan. Lebih lanjut, *overfishing* dapat menyebabkan hilangnya individu berukuran besar yang memiliki peran penting dalam reproduksi, dominasi ikan berusia muda, serta penurunan keragaman genetik yang berdampak pada rendahnya ketahanan populasi terhadap tekanan lingkungan. Selain itu, perubahan perilaku seperti terganggunya pola migrasi juga menjadi bagian dari dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan. Tidak hanya dari sisi ekologis, penelitian ini juga menyoroti adanya faktor sosial dan ekonomi, seperti kebijakan yang tidak efektif, subsidi perikanan, serta praktik penangkapan yang telah mengakar, yang turut mempertahankan kondisi eksploitasi berlebihan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa *overfishing* merupakan permasalahan kompleks yang memiliki dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai *overfishing* sebagai permasalahan global telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik yang menyoroti aspek ekologi, ekonomi, maupun tata kelola sumber daya laut. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik *overfishing* tidak hanya berdampak pada penurunan stok ikan, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis berbasis data kuantitatif dan kebijakan, sementara kajian yang melihat bagaimana *overfishing* direpresentasikan dalam media, khususnya film dokumenter, masih relatif terbatas. Padahal, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu isu global (Robert Entman, 1993). Oleh karena itu, kajian terhadap representasi *overfishing* dalam film *Seaspiracy* menjadi relevan untuk

mengisi celah tersebut sekaligus memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami permasalahan ini.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai film dokumenter dalam Hubungan Internasional maupun penelitian yang menggunakan objek film *Seaspiracy* masih didominasi oleh pembahasan yang bersifat umum. Penelitian van Munster dan Sylvest (2015) misalnya, lebih berfokus pada peran film dokumenter sebagai medium representasi dan konstruksi realitas dalam politik internasional secara umum tanpa membahas isu maupun objek film tertentu secara spesifik. Sementara itu, penelitian Pardede et al. (2023) dan Pertiwi et al. (2022) telah menjadikan *Seaspiracy* sebagai objek penelitian, namun analisis yang dilakukan masih berfokus pada representasi makna, simbol, serta eksploitasi sumber daya laut dan *overfishing* melalui pendekatan semiotika. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis bagaimana film *Seaspiracy* membingkai (*frame*) isu *overfishing* melalui konstruksi narasi, pemilihan aktor, serta penyebab dan konsekuensi yang ditampilkan dalam film. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum mengaitkan framing yang dibangun dalam *Seaspiracy* dengan konsep *Tragedy of The commons* untuk menjelaskan bagaimana eksploitasi sumber daya laut sebagai *global commons* direpresentasikan dalam film. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis framing isu *overfishing* dalam film *Seaspiracy* menggunakan perspektif *Tragedy of The commons*.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

1.5.2.1. *The Tragedy of The commons*

Tragedy of The commons merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Garrett Hardin dalam bukunya pada tahun 1968 untuk menjelaskan bagaimana dampak dari pemanfaatan sumber daya bersama dalam kondisi dunia yang terbatas (*finite world*). Hardin berangkat dari asumsi bahwa pertumbuhan populasi manusia cenderung meningkat secara eksponensial, sementara ketersediaan sumber daya tidak dapat bertambah secara sebanding, sehingga menciptakan tekanan terhadap sumber daya yang bersifat bersama (*commons*) (Hardin, 1968). Dalam kondisi ini, sumber daya yang tidak memiliki batas kepemilikan yang jelas menjadi terbuka untuk diakses oleh semua pihak, yang pada akhirnya mendorong peningkatan penggunaan secara terus-menerus hingga melampaui kapasitasnya. Dalam bukunya, Hardin menggunakan ilustrasi padang rumput bersama untuk menunjukkan bagaimana setiap pengguna terus menambah pemanfaatan sumber daya hingga terjadi kelebihan beban. Ia juga menekankan bahwa dinamika ini tidak terjadi karena kesalahan individu semata, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur penggunaan bersama yang tidak memiliki batas yang jelas. Hardin menggambarkan bahwa dalam sistem seperti ini, penggunaan bersama yang bersifat eksploitatif tanpa batas akan mengarah pada degradasi sumber daya, di mana “*freedom in a commons brings ruin to all,*” yang menunjukkan bahwa kebebasan akses terhadap sumber daya bersama justru berpotensi menghasilkan kerusakan yang kumulatif (Hardin, 1968).

Dalam tulisannya, Hardin juga mengkritik gagasan utilitarian Jeremy Bentham mengenai “*the greatest good for the greatest number*” dengan menunjukkan keterbatasan konseptual dalam mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu memaksimalkan jumlah populasi dan kualitas hidup. Hardin berargumen bahwa dalam dunia yang terbatas, peningkatan jumlah manusia secara terus-menerus akan berdampak pada penurunan kualitas hidup, sehingga kedua variabel tersebut tidak dapat dimaksimalkan secara bersamaan. Ia menegaskan bahwa secara matematis tidak mungkin untuk mengoptimalkan lebih dari satu variabel sekaligus, sehingga upaya untuk mencapai kesejahteraan maksimal bagi jumlah manusia yang terus bertambah menjadi tidak realistis (Hardin, 1968).

Lebih lanjut, Hardin menunjukkan bahwa *Tragedy of The commons* merupakan suatu kondisi yang cenderung terus berulang dan sulit untuk dipecahkan. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar sistem commons itu sendiri, di mana tidak adanya pembatasan kepemilikan membuat tekanan terhadap sumber daya akan selalu muncul kembali seiring bertambahnya jumlah pengguna. Hardin menekankan bahwa bahkan ketika masyarakat telah memahami potensi kerusakan tersebut, kecenderungan untuk tetap memanfaatkan sumber daya secara berlebihan akan terus terjadi, sehingga tragedi ini bersifat persisten. Ia juga menggarisbawahi bahwa pengetahuan mengenai risiko tidak selalu cukup untuk mencegah terulangnya pola yang sama, karena dinamika penggunaan bersama tetap mendorong eksploitasi hingga melampaui kapasitasnya. Dengan demikian, *Tragedy of The commons* tidak hanya menggambarkan satu peristiwa kerusakan,

tetapi juga suatu pola berulang yang melekat dalam sistem pemanfaatan sumber daya bersama dalam dunia yang terbatas (Hardin, 1968).

Selain itu, Hardin juga menunjukkan bahwa kompleksitas dalam pengelolaan *commons* semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna dan keragaman kepentingan yang terlibat. Ia menekankan bahwa sumber daya bersama tidak hanya menghadapi tekanan dari sisi jumlah pemanfaatan, tetapi juga dari kesulitan dalam menentukan ukuran penggunaan yang tepat serta batasan yang dapat diterima secara kolektif. Dalam konteks ini, Hardin menyatakan bahwa “*we can make little progress in working toward optimum population size until we explicitly exorcize the spirit of Adam Smith in the field of practical demography,*” yang menunjukkan bahwa asumsi mengenai keteraturan yang muncul secara otomatis tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas tersebut (Hardin, 1968). Meskipun konsep *Tragedy of The commons* yang dikemukakan Hardin (1968) memberikan penjelasan mengenai kecenderungan eksploitasi sumber daya bersama, teori ini juga memperoleh berbagai kritik. Dalam konteks pengelolaan sumber daya laut, tidak seluruh wilayah laut merupakan *open access commons*. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), terdapat pembagian yurisdiksi seperti laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas (*high seas*), yang masing-masing memiliki rezim hukum dan mekanisme pengelolaan yang berbeda. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya laut tidak semata-mata terjadi karena sifat *commons*, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola, kapasitas pengawasan negara,

implementasi kuota dan lisensi penangkapan, serta kepatuhan terhadap rezim internasional.

Dengan demikian, penelitian ini tidak memaknai *Tragedy of The commons* sebagai penjelasan tunggal atas fenomena *overfishing*. Konsep tersebut digunakan sebagai lensa untuk memahami kecenderungan eksploitasi sumber daya bersama, namun analisis juga mempertimbangkan dimensi tata kelola global (*Global Environmental Governance*), termasuk peran negara, organisasi internasional, dan rezim hukum laut internasional dalam mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan dan menggambarkan tantangan dalam memahami dan mengelola dinamika kolektif yang semakin kompleks dalam sistem tanpa batas kepemilikan yang jelas.

1.5.2.2. Media framing

Konsep *media framing* merupakan salah satu pendekatan penting dalam dunia komunikasi, *media framing* digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu realitas sosial dikonstruksikan dan dipresentasikan kepada publik melalui media. Paul D'Angelo menjelaskan bahwa *media frame* adalah cara komunikator membawakan suatu isu melalui pesan yang disampaikan dalam bentuk teks, gambar, maupun visual lainnya (D'Angelo, 2017). Dalam hal ini, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif membentuk makna dari suatu peristiwa, isu, atau fenomena tertentu. Proses ini melibatkan pemilihan informasi tertentu, penekanan pada aspek-aspek

spesifik, serta pengabaian terhadap elemen lain yang dianggap kurang relevan, sehingga menghasilkan representasi realitas yang tidak sepenuhnya netral.

Dalam perkembangannya, *media framing* dipahami sebagai proses yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya melibatkan produksi pesan oleh komunikator, tetapi juga interaksi antara berbagai aktor dalam ekosistem media. D'Angelo menekankan bahwa komunikator dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti jurnalis, politisi, organisasi, maupun individu, sementara audiens tidak lagi bersifat pasif, melainkan dapat turut berperan dalam membentuk dan menyebarkan frame melalui perkembangan teknologi komunikasi (D'Angelo, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa framing bukan sekadar proses satu arah, tetapi merupakan bagian dari dinamika komunikasi yang lebih luas, di mana makna terus diproduksi, dipertukarkan, dan dinegosiasikan.

Lebih lanjut, D'Angelo mengidentifikasi dua mekanisme utama dalam pembentukan *media frame*, yaitu *emphasis framing* dan *equivalency framing*. *Emphasis framing* merujuk pada upaya komunikator dalam menonjolkan aspek tertentu dari suatu isu melalui pengulangan, asosiasi, dan seleksi informasi, sehingga membentuk cara pandang tertentu terhadap isu tersebut. Sementara itu, *equivalency framing* berkaitan dengan penyajian informasi yang secara logis setara, namun dikemas dalam bentuk yang berbeda, seperti penekanan pada keuntungan (*gain*) atau kerugian (*loss*), yang dapat memengaruhi cara individu dalam memahami dan mengevaluasi suatu pilihan (D'Angelo, 2017).

Pada akhirnya, *media framing* tidak hanya menggambarkan bagaimana media menyajikan realitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana realitas tersebut dikonstruksikan melalui proses seleksi, penekanan, dan interpretasi yang dilakukan secara sistematis. D'Angelo menegaskan bahwa framing berfungsi untuk membentuk dasar kognitif individu dalam memahami suatu isu, sehingga memengaruhi cara mereka berpikir, menilai, dan merespons informasi yang diterima (D'Angelo, 2017). Dengan demikian, *media framing* dapat dipahami sebagai suatu proses yang melekat dalam produksi dan distribusi informasi, yang secara terus-menerus membentuk cara masyarakat memaknai realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari.

1.5.2.3. *Global Environmental Governance*

Konsep *Global Environmental Governance* (GEG) berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan lingkungan yang melampaui batas yurisdiksi suatu negara. Speth dan Haas (2006) menjelaskan bahwa *Global Environmental Governance* merupakan seperangkat proses, institusi, aturan, norma, serta mekanisme kerja sama yang dibentuk untuk mengelola berbagai persoalan lingkungan yang bersifat lintas batas maupun global. Dalam perspektif ini, isu lingkungan tidak lagi dipandang sebagai urusan domestik semata, melainkan sebagai persoalan bersama yang memerlukan koordinasi antarnegara serta keterlibatan berbagai aktor internasional. Dengan demikian, *Global Environmental Governance* menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian

dari tata kelola global yang membutuhkan pengaturan kolektif agar keberlanjutan sumber daya alam dapat terjaga.

Dalam perkembangannya, *Global Environmental Governance* lahir dari kesadaran bahwa perubahan lingkungan pada abad ke-20 mengalami peningkatan yang sangat signifikan akibat pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya eksploitasi sumber daya alam. Speth dan Haas (2006) menjelaskan bahwa berbagai persoalan yang sebelumnya bersifat lokal berkembang menjadi tantangan global karena dampaknya melintasi batas negara dan memengaruhi sistem ekologis dunia. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk kerja sama internasional sebagai upaya kolektif dalam menghadapi ancaman lingkungan global. Oleh karena itu, tata kelola lingkungan tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga memerlukan koordinasi internasional melalui berbagai aturan, institusi, dan mekanisme bersama untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, Speth dan Haas (2006) mengidentifikasi bahwa *Global Environmental Governance* dibangun atas beberapa karakteristik utama. Pertama, berbagai persoalan lingkungan global muncul akibat penyalahgunaan sumber daya bersama (*global commons*), pencemaran lintas batas (*transboundary pollution*), kerusakan sumber daya alam yang menjadi kepentingan masyarakat internasional, serta permasalahan lingkungan domestik yang dialami banyak negara secara bersamaan. Kedua, penyelesaian permasalahan tersebut tidak hanya bergantung pada negara sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan organisasi internasional,

organisasi non-pemerintah, komunitas ilmiah, sektor swasta, serta masyarakat sipil yang bersama-sama berkontribusi dalam pembentukan kebijakan, penyebaran pengetahuan, maupun implementasi tata kelola lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa *Global Environmental Governance* merupakan bentuk tata kelola yang bersifat multilevel dan multiaktor.

Salah satu konsep penting dalam *Global Environmental Governance* adalah *global commons* dan *common concern of humankind*. Speth dan Haas (2006) menjelaskan bahwa *global commons* merujuk pada wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara, seperti laut lepas, dasar laut internasional, atmosfer, Antartika, dan ruang angkasa, sehingga pemanfaatannya memerlukan pengelolaan secara kolektif. Sementara itu, konsep *common concern of humankind* menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di dalam wilayah kedaulatan suatu negara tetap dapat menjadi perhatian masyarakat internasional apabila dampaknya memengaruhi keberlanjutan sistem lingkungan global. Dengan demikian, kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak dapat hanya didasarkan pada kepentingan nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan bersama umat manusia.

Pada akhirnya, *Global Environmental Governance* tidak hanya menjelaskan bagaimana berbagai aktor internasional bekerja sama dalam mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana suatu isu lingkungan dikonstruksikan sebagai permasalahan global yang membutuhkan respons kolektif. Speth dan Haas (2006) menegaskan bahwa efektivitas tata kelola

lingkungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai aktor dalam membangun kesepahaman mengenai urgensi suatu isu serta mendorong terciptanya norma, kebijakan, dan tindakan Bersama

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual *Tragedy of The commons*

1.6.1.1. The *Tragedy of commons*

Garrett Hardin menjelaskan bahwa sumber daya bersama (*commons*) yang terbuka untuk diakses oleh banyak pihak memiliki potensi tinggi mengalami eksploitasi secara berlebihan. Dalam konsep *Tragedy of The commons*, Hardin menyatakan bahwa setiap individu cenderung memanfaatkan sumber daya tersebut demi memenuhi kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya. Ketika pemanfaatan dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya batasan maupun pengawasan yang efektif, sumber daya bersama akan mengalami penurunan kualitas hingga kerusakan. Menurut Hardin (1968), permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya mekanisme pengendalian yang mampu mengatur penggunaan sumber daya secara kolektif. Oleh sebab itu, *Tragedy of The commons* menggambarkan situasi ketika tindakan rasional yang dilakukan individu untuk memperoleh keuntungan justru menghasilkan kerugian bersama bagi seluruh pihak yang bergantung pada sumber daya tersebut.

1.6.1.2. Pembatasan Akses (Restriction of Access)

Dalam tulisannya, Hardin juga menyoroti pentingnya pembatasan akses dalam pengelolaan sumber daya bersama (*commons*), terutama ketika sumber daya tersebut tidak dapat terus dibiarkan terbuka tanpa kontrol. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks seperti taman nasional, peningkatan jumlah pengguna tanpa batas akan secara langsung menurunkan kualitas lingkungan yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mengatur siapa yang dapat mengakses sumber daya tersebut serta dalam jumlah atau kondisi tertentu. Hardin mengemukakan beberapa bentuk pengaturan, seperti penerapan kuota, sistem antrian, maupun metode seleksi lainnya untuk mendistribusikan akses secara lebih terkontrol (Hardin, 1968).

1.6.1.3. Regulasi Pemerintah (State Based Resource Management)

Hardin menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama (*commons*) sangat bergantung pada keterlibatan otoritas publik, khususnya pemerintah, dalam merumuskan serta menegakkan regulasi yang bersifat mengikat. Ia berargumen bahwa dalam kondisi akses terbuka, penggunaan sumber daya tidak dapat dikendalikan hanya melalui kesadaran individu, sehingga diperlukan intervensi melalui aturan hukum yang mampu membatasi perilaku pemanfaatan. Hardin secara eksplisit menyebutkan bahwa masalah *commons* harus diatasi melalui “*coercive laws*,” yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk menjaga agar penggunaan sumber daya tidak melampaui kapasitasnya (Hardin, 1968). Dengan demikian, pengelolaan *commons* dipahami sebagai proses yang

bergantung pada keberadaan regulasi formal dan otoritas publik yang mampu menciptakan keteraturan dalam sistem penggunaan sumber daya Bersama.

1.6.2. Definisi Konseptual Media Frame

1.6.2.1. Media Frame

D'Angelo dalam tulisannya, menjelaskan bahwa *media framing* merupakan proses bagaimana media membentuk dan mengorganisasikan realitas sosial melalui seleksi, penekanan, dan penyusunan informasi dalam suatu teks komunikasi. Ia berargumen bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi secara netral, tetapi juga berperan dalam menentukan aspek mana dari suatu isu yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh audiens. Dalam konteks ini, framing bekerja dengan menonjolkan elemen tertentu sekaligus mengurangi perhatian terhadap elemen lain, sehingga memengaruhi cara individu memahami, menilai, dan merespons suatu realitas sosial (D'Angelo, 2017). D'Angelo secara khusus menekankan bahwa frame terbentuk melalui berbagai perangkat komunikasi, seperti pemilihan kata, struktur narasi, simbol, visual, dan pola penyajian informasi yang digunakan media dalam merepresentasikan suatu isu. Dengan demikian, media framing dipahami sebagai proses konstruksi makna yang tidak hanya menentukan bagaimana suatu isu ditampilkan, tetapi juga bagaimana isu tersebut diinterpretasikan dalam kesadaran publik.

1.6.2.2. *Emphasis framing*

Framing: Media Frame yang ditulis oleh Paul D'Angelo menjelaskan sebuah konsep *emphasis framing*. *Emphasis framing* merupakan bentuk framing yang menempatkan perhatian lebih besar pada aspek-aspek tertentu dari suatu isu agar aspek tersebut dianggap paling signifikan oleh audiens. Menurutnya, media tidak merepresentasikan realitas secara utuh, tetapi cenderung memilih informasi tertentu untuk ditampilkan secara lebih dominan dibandingkan informasi lainnya. Proses ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan bahasa tertentu, pengulangan pesan, penyusunan narasi, maupun penggunaan elemen visual yang mampu menarik perhatian audiens (D'Angelo, 2017). Dalam praktiknya, penekanan terhadap elemen tertentu tersebut memengaruhi bagaimana audiens memaknai dan menilai suatu isu, karena informasi yang lebih sering disorot akan lebih mudah menarik perhatian serta tersimpan dalam ingatan publik. Oleh karena itu, *emphasis framing* dipahami sebagai strategi media dalam membangun pemahaman audiens dengan cara mengarahkan fokus pada aspek tertentu dari realitas yang disajikan.

1.6.3. Definisi Konseptual *Global Environmental Governance*

1.6.3.1. *Global Environmental Governance*

Global Environmental Governance (GEG) merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana masyarakat internasional mengatur, mengelola, dan merespons berbagai permasalahan lingkungan yang bersifat global melalui seperangkat norma, aturan, institusi, organisasi, serta mekanisme kerja sama. Speth

dan Haas menjelaskan bahwa *Global Environmental Governance* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan lingkungan yang melampaui batas yurisdiksi suatu negara, sehingga penyelesaiannya tidak lagi dapat dilakukan secara unilateral, melainkan memerlukan koordinasi dan kolaborasi antarberbagai aktor di tingkat internasional (Speth & Haas, 2006). Dalam konsep ini, tata kelola lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, komunitas ilmiah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan norma, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, serta pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan. Menurut Speth dan Haas (2006), *Global Environmental Governance* merupakan suatu sistem tata kelola yang bersifat multidimensi karena mengintegrasikan berbagai aktor, institusi, dan mekanisme kerja sama untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

1.6.3.2. Multi-Actor Governance

Speth dan Haas dalam pembahasannya mengenai *Global Environmental Governance* menjelaskan bahwa *multi-actor governance* merupakan suatu pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dalam penyelesaian persoalan lingkungan global. Mereka berargumen bahwa kompleksitas permasalahan lingkungan tidak dapat ditangani oleh negara sebagai satu-satunya aktor, melainkan memerlukan keterlibatan organisasi internasional, organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*), komunitas ilmiah, sektor swasta,

serta masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tata kelola lingkungan (Speth & Haas, 2006). Dalam konteks ini, setiap aktor menjalankan peran sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga proses tata kelola berlangsung melalui koordinasi, kolaborasi, serta pembagian tanggung jawab di antara berbagai pihak. Speth dan Haas (2006), juga menekankan bahwa keterlibatan berbagai aktor tersebut memungkinkan terciptanya proses tata kelola yang lebih adaptif terhadap dinamika persoalan lingkungan, karena setiap aktor dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan, sumber daya, pengawasan, maupun advokasi dalam mendukung tercapainya tujuan perlindungan lingkungan (Speth & Haas, 2006). Dengan demikian, *multi-actor governance* dipahami sebagai suatu mekanisme tata kelola yang menempatkan kerja sama dan interaksi antarberbagai aktor sebagai elemen utama dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan lingkungan pada tingkat global.

1.6.3.3. Global Environmental Threats

Menurut Speth dan Haas (2006), perkembangan aktivitas manusia telah menyebabkan berbagai persoalan lingkungan mengalami peningkatan skala hingga menjadi ancaman yang berdampak secara global. Peningkatan eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta pola konsumsi yang semakin tinggi telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap sistem ekologis bumi, sehingga berbagai kerusakan lingkungan tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu, tetapi menimbulkan konsekuensi yang dirasakan oleh banyak negara.

Dalam kerangka *Global Environmental Governance*, Speth dan Haas (2006) mengelompokkan ancaman tersebut ke dalam sepuluh kategori utama, yaitu hujan asam (*acid rain*), penipisan lapisan ozon (*ozone depletion*), perubahan iklim (*climate change*), deforestasi, degradasi lahan, pencemaran dan kelangkaan air tawar, ancaman terhadap ekosistem laut (*marine threats*), pencemaran oleh bahan kimia berbahaya (*persistent organic pollutants*), hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), serta kelebihan nitrogen (*nitrogen excess*). Kesepuluh ancaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan memiliki karakter lintas batas dan saling berkaitan, sehingga penanganannya memerlukan pengelolaan yang terkoordinasi melalui mekanisme tata kelola lingkungan pada tingkat global.

1.6.4. Definisi operasional *Tragedy of The commons*

1.6.4.1. Pembatasan Akses (*Restriction of Access*)

Eksploitasi sumber daya laut pada film *Seaspiracy* menunjukkan bahwa praktik *overfishing* mencerminkan dinamika *Tragedy of The commons*, di mana akses terbuka terhadap sumber daya perikanan mendorong eksploitasi berlebihan oleh berbagai aktor tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Dalam perspektif Garrett Hardin, permasalahan tersebut dapat diminimalkan melalui *restriction of access*, yaitu pembatasan akses terhadap sumber daya bersama melalui instrumen seperti kuota tangkapan, sistem lisensi terbatas, zonasi wilayah tangkap, serta pengaturan berbasis waktu dan musim penangkapan guna mengontrol intensitas eksploitasi (Hardin, 1968). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan tidak lagi berbasis pada kebebasan akses, melainkan pada

prinsip *mutual coercion, mutually agreed upon* yang menekankan pentingnya regulasi kolektif untuk mencegah degradasi sumber daya secara sistemik. Pendekatan ini menjadi relevan dalam menjawab kritik yang disampaikan dalam *Seaspiracy*, khususnya terkait kegagalan sistem pengelolaan global dalam mengendalikan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, sehingga pembatasan akses yang efektif dan adil menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan ekosistem laut.

Dalam implementasinya pada tingkat internasional, pembatasan akses tersebut diwujudkan melalui keberadaan rezim internasional yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara kolektif. Rezim internasional dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang menjadi pedoman bagi perilaku negara dalam suatu isu tertentu (Krasner, 1983). Dalam konteks perikanan global, rezim internasional tercermin melalui berbagai instrumen seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang dikeluarkan FAO, serta berbagai *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) yang bertugas menetapkan kuota tangkapan, wilayah pengelolaan, dan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Oleh karena itu, keberadaan rezim internasional dapat dipahami sebagai bentuk operasional dari *restriction of access* pada tingkat global, karena berfungsi membatasi pemanfaatan sumber daya laut melalui aturan dan kesepakatan bersama guna mencegah eksploitasi berlebihan serta menjaga keberlanjutan stok ikan dalam jangka panjang.

1.6.4.2. Regulasi Pemerintah (State Based Resource Management)

Dalam konteks eksploitasi sumber daya laut sebagaimana ditampilkan dalam film *Seaspiracy*, praktik *overfishing* mencerminkan kegagalan pengelolaan sumber daya bersama yang tidak diimbangi oleh regulasi pemerintah yang efektif. Mengacu pada Hardin, permasalahan commons tidak dapat diselesaikan melalui kesadaran individu semata, melainkan memerlukan penerapan *coercive laws* atau hukum yang bersifat memaksa untuk mengatur perilaku pemanfaatan sumber daya (Hardin, 1968). Hardin mencontohkan bentuk konkret dari mekanisme koersif tersebut, seperti sistem perizinan serta pembatasan penggunaan melalui aturan hukum yang membuat eksploitasi berlebihan menjadi tidak menguntungkan secara ekonomi maupun legal. Dalam konteks *overfishing*, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan seperti penetapan kuota tangkapan, pembatasan akses melalui lisensi penangkapan, serta regulasi yang mengatur waktu dan wilayah penangkapan. Oleh karena itu, praktik *overfishing* yang ditampilkan dalam Film *Seaspiracy* menunjukkan absennya atau lemahnya penerapan *coercive laws* dalam pengelolaan sumber daya laut, sehingga eksploitasi berlangsung tanpa kontrol yang memadai dan berujung pada degradasi ekosistem secara berkelanjutan

1.6.5 Definisi Operasional Media Framing

1.6.5.1. Media Framing

Representasi isu *overfishing* dalam penelitian ini dianalisis menggunakan konsep *media framing* sebagaimana dijelaskan oleh D'Angelo (2017), yang

memandang media sebagai aktor yang membentuk dan mengorganisasikan realitas sosial melalui proses seleksi, penekanan, dan penyusunan informasi dalam teks komunikasi. Dalam film *Seaspiracy*, framing dioperasionalkan melalui cara film menampilkan isu eksploitasi sumber daya laut dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu yang dianggap penting untuk membangun pemahaman audiens terhadap krisis *overfishing* global. Mengacu pada konsep tersebut, penelitian ini melihat bagaimana penggunaan narasi, visual, data statistik, wawancara, serta struktur penyajian informasi dalam film digunakan untuk membentuk konstruksi makna mengenai kondisi ekosistem laut, praktik industri perikanan, dan dampak eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan (D'Angelo, 2017). Dengan demikian, media framing dalam penelitian ini dipahami sebagai proses representasi isu yang membentuk cara audiens memahami, menilai, dan menginterpretasikan fenomena *overfishing* melalui penonjolan informasi tertentu dalam penyajian media.

1.6.5.2. *Emphasis framing*

Dalam penelitian ini, isu *overfishing* dianalisis melalui konsep *emphasis framing* yang dikemukakan oleh D'Angelo (2017), yaitu pendekatan framing yang menitikberatkan pada penyorotan bagian tertentu dari suatu realitas agar dianggap lebih penting oleh audiens. Pada film *Seaspiracy*, konsep ini dioperasionalkan melalui cara film mengarahkan perhatian penonton pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya laut, seperti degradasi ekosistem, aktivitas penangkapan ikan skala industri, tingginya praktik *bycatch*, serta lemahnya kontrol terhadap aktivitas perikanan internasional. Penekanan tersebut

dibangun melalui kombinasi narasi, tampilan visual, penyajian data, dan wawancara yang terus diulang untuk memperkuat kesan mengenai seriusnya krisis *overfishing* yang terjadi secara global (D'Angelo, 2017). Dengan demikian, *emphasis framing* dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana film memusatkan perhatian audiens pada aspek-aspek tertentu dari isu *overfishing* melalui pola penonjolan informasi dalam penyajian media.

1.6.6. Definisi Operasional *Global Environmental Governance*

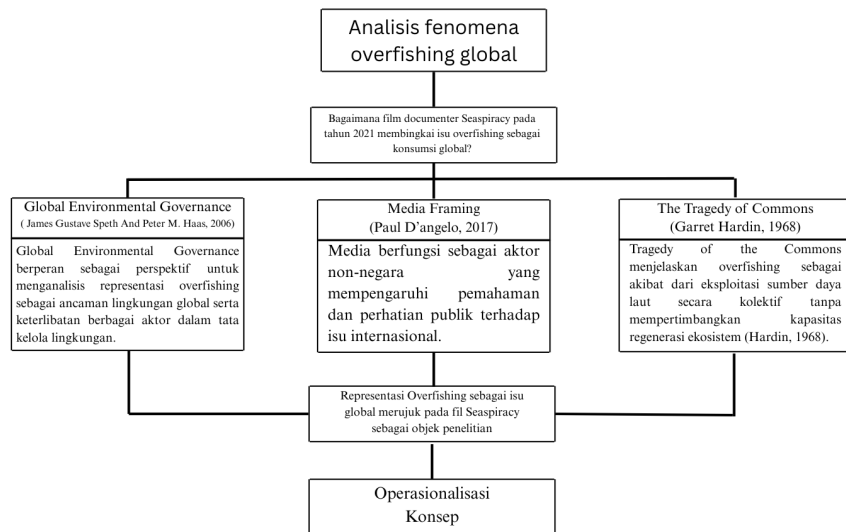
1.6.4.1. Multi actor Governance

Representasi isu *overfishing* dalam penelitian ini dianalisis menggunakan konsep *multi-actor governance* sebagaimana dijelaskan oleh Speth dan Haas (2006), yang memandang tata kelola lingkungan global sebagai proses yang melibatkan interaksi berbagai aktor, baik negara maupun aktor non-negara, dalam merumuskan, melaksanakan, dan memengaruhi upaya penyelesaian persoalan lingkungan. Dalam penelitian ini, *multi-actor governance* dioperasionalkan melalui identifikasi aktor-aktor yang direpresentasikan dalam film beserta peran, kepentingan, dan hubungan yang dibangun di antara mereka dalam konteks pengelolaan isu *overfishing*. Mengacu pada konsep tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana film merepresentasikan keterlibatan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah (*non-governmental organizations*), komunitas ilmiah, sektor industri perikanan, maupun masyarakat sipil sebagai bagian dari sistem tata kelola lingkungan global, serta bagaimana interaksi antaraktor tersebut dikonstruksikan dalam narasi film (Speth & Haas, 2006). Dengan demikian, *multi-actor governance* dalam penelitian ini dipahami

sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi representasi berbagai aktor beserta relasi, peran, dan kontribusinya dalam membentuk tata kelola terhadap permasalahan lingkungan yang diangkat dalam film.

1.6.4.2. Global Environmental Threat

Dalam konteks eksploitasi sumber daya laut sebagaimana ditampilkan dalam film *Seaspiracy*, praktik *overfishing* dipahami sebagai salah satu bentuk *global environmental threats* yang memiliki dampak terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat di berbagai negara. Mengacu pada Speth dan Haas (2006), ancaman lingkungan global merupakan permasalahan yang melampaui batas yurisdiksi suatu negara karena penyebab maupun dampaknya bersifat lintas batas, sehingga memerlukan perhatian serta penanganan melalui mekanisme tata kelola lingkungan global. Dalam penelitian ini, konsep *global environmental threats* digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana film merepresentasikan *overfishing* sebagai ancaman lingkungan yang tidak hanya mengakibatkan penurunan stok ikan, tetapi juga memengaruhi keseimbangan ekosistem laut, keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu, representasi *overfishing* dalam film dianalisis sebagai bagian dari ancaman lingkungan global yang menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya laut merupakan persoalan bersama yang berdampak lintas negara dan memerlukan pengelolaan secara kolektif melalui mekanisme *Global Environmental Governance* (Speth & Haas, 2006).



Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Berpikir

1.7. Argumen Penelitian

Film dokumenter *Seaspiracy* (2021) karya Ali Tabrizi merupakan media yang membangun representasi tertentu mengenai isu *overfishing* melalui penyusunan narasi, visual, wawancara, dan pemilihan informasi yang ditampilkan dalam film. Melalui berbagai elemen tersebut, *Seaspiracy* membingkai *overfishing* sebagai persoalan lingkungan global yang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya laut, tetapi juga dengan berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaannya pada tingkat internasional. Framing yang dibangun dalam film ini mengarahkan audiens untuk memahami bahwa eksploitasi sumber daya laut merupakan konsekuensi dari pemanfaatan sumber daya bersama (*commons*) yang berlangsung secara berlebihan dan tidak diimbangi dengan mekanisme pengelolaan

yang efektif. Dalam konteks tersebut, konsep *Tragedy of The commons* yang dikemukakan oleh Hardin (1968) digunakan untuk memahami bagaimana film merepresentasikan praktik eksploitasi sumber daya laut sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya bersama yang berorientasi pada kepentingan masing-masing aktor. Selanjutnya, perspektif *Global Environmental Governance* digunakan sebagai kerangka pendukung untuk menjelaskan bagaimana film merepresentasikan *overfishing* sebagai ancaman lingkungan global serta bagaimana peran dan interaksi berbagai aktor dalam tata kelola lingkungan direpresentasikan sebagai bagian dari upaya merespons persoalan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana film *Seaspiracy* membingkai isu *overfishing* sebagai bentuk *Tragedy of The commons* serta bagaimana representasi tersebut dipahami dalam perspektif *Global Environmental Governance*.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap fenomena media yang sebagaimana direpresentasikan dalam film *Seaspiracy*. Metode kualitatif berorientasi pada pemahaman makna, interpretasi, dan konstruksi sosial di balik suatu fenomena, sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana media dokumenter membingkai suatu isu tertentu (Creswell, 2014). Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penyampaian isi film secara faktual, tetapi juga menganalisis bagaimana narasi, visual, wawancara, dan

pemilihan aktor dalam film digunakan untuk membangun representasi tertentu mengenai isu *overfishing* dan eksploitasi sumber daya laut. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana film *Seaspiracy* merepresentasikan praktik *overfishing* sebagai bentuk *Tragedy of The commons*, yaitu kondisi ketika pemanfaatan sumber daya bersama secara berlebihan oleh berbagai aktor menyebabkan degradasi sumber daya yang merugikan kepentingan bersama (Hardin, 1968). Dengan demikian, pendekatan deskriptif-analitis dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana film dokumenter berfungsi sebagai media representasi dan konstruksi realitas dalam isu lingkungan global.

Pendekatan ini membantu peneliti memahami secara kontekstual bagaimana film *Seaspiracy* merepresentasikan relasi antar aktor dalam industri perikanan global serta membangun narasi mengenai eksploitasi sumber daya laut sebagai isu lingkungan internasional. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi dan kategorisasi adegan wawancara, dialog, serta informasi visual yang relevan dengan konsep media framing dan representasi isu lingkungan dalam film dokumenter. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep framing dari Paul D'Angelo (2017) untuk melihat bagaimana film mendefinisikan masalah, menampilkan aktor yang dianggap bertanggung jawab, serta membangun penyebab dan konsekuensi dari isu yang diangkat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana isu ditampilkan dalam film, tetapi juga menganalisis bagaimana media dokumenter membentuk cara audiens memahami

realitas sosial dan politik yang direpresentasikan melalui narasi visual yang disusun dalam film tersebut.

Pemilihan pendekatan deskriptif-analitis juga didasarkan pada kebutuhan untuk menghubungkan representasi dalam film dengan konteks yang digunakan, sehingga hasil penelitian tidak berhenti pada level deskriptif, melainkan mampu menghasilkan interpretasi yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, film *Seaspiracy* dipahami sebagai media yang kemudian dipertemukan dengan konsep framing, representasi media, serta posisi film dokumenter dalam kajian Hubungan Internasional. Selain itu, data empiris dari laporan global dan kajian mengenai isu lingkungan digunakan sebagai pendukung untuk melihat kesesuaian antara representasi dalam film dengan realitas yang berkembang di masyarakat internasional. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai relevan dan efektif untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berfokus pada bagaimana film *Seaspiracy* membingkai isu *overfishing* dalam konteks politik lingkungan global.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis media framing dalam film dokumenter *Seaspiracy*. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana suatu realitas direpresentasikan melalui media, khususnya melalui narasi, visual, wawancara, dan penyusunan informasi dalam film dokumenter (Creswell, 2014). Tipe penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana film

Seaspiracy mbingkai isu *overfishing* dan eksploitasi sumber daya laut dalam konteks lingkungan global. Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis secara interpretatif untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena sosial maupun media yang diteliti (Moleong, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada isi film secara deskriptif, tetapi juga menganalisis bagaimana elemen-elemen media dalam film digunakan untuk membangun pemahaman tertentu mengenai isu *overfishing* kepada audiens. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif dinilai relevan karena mampu menjelaskan bagaimana media dapat berfungsi sebagai sarana representasi dan konstruksi realitas dalam isu-isu Hubungan Internasional (Entman, 1993). Dengan demikian, tipe penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana film dokumenter *Seaspiracy* merepresentasikan isu *overfishing* melalui proses framing yang dibangun dalam narasi film.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dalam penelitian ini berfokus pada media dokumenter *Seaspiracy* sebagai objek kajian utama dalam menganalisis framing isu *overfishing* dan eksploitasi sumber daya laut. Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi geografis tertentu, melainkan pada representasi media yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut. Film *Seaspiracy* dipilih karena merupakan salah satu dokumenter lingkungan yang secara luas mengangkat isu eksploitasi sumber daya laut dalam konteks global melalui penyajian visual, wawancara, data statistik, serta investigasi lapangan yang dilakukan di berbagai negara (Tabrizi, 2021). Selain itu,

film ini juga memperoleh perhatian luas dari masyarakat internasional karena membahas hubungan antara industri perikanan global, tata kelola sumber daya laut, dan praktik *overfishing* sebagai isu lingkungan global. Dalam penelitian ini, situs penelitian dipahami sebagai ruang representasi media tempat berbagai narasi, visual, dan konstruksi isu dibangun untuk membentuk pemahaman audiens terhadap suatu fenomena tertentu (Entman, 1993). Oleh karena itu, fokus penelitian tidak terletak pada kondisi empiris di suatu wilayah tertentu, tetapi pada bagaimana film dokumenter *Seaspiracy* membingkai isu *overfishing* melalui elemen-elemen media yang ditampilkan dalam film. Selain menggunakan film sebagai sumber data primer, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur, jurnal, laporan internasional, dan sumber pendukung lainnya sebagai referensi untuk memahami konteks isu yang direpresentasikan dalam film dokumenter tersebut.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah representasi praktik *overfishing* sebagaimana ditampilkan dalam film dokumenter *Seaspiracy*, yang dipilih karena film tersebut secara langsung menggambarkan dinamika eksploitasi sumber daya laut dalam skala global. Film ini tidak hanya menampilkan aktivitas industri perikanan, tetapi juga memperlihatkan berbagai dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan akibat praktik *overfishing*. Dengan demikian, subjek penelitian ini mencakup narasi, visual, serta informasi yang disajikan dalam film yang merefleksikan hubungan antara aktor-aktor industri, kebijakan pengelolaan, dan kondisi ekosistem laut.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sesuai dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami representasi fenomena *overfishing* dalam film *Seaspiracy* melalui perspektif *Tragedy of The commons*. Data primer diperoleh dari film dokumenter *Seaspiracy* berupa adegan wawancara, dialog, dan narasi visual yang relevan dengan isu eksploitasi sumber daya laut, yang kemudian dianalisis untuk menggali makna dan konteks yang ditampilkan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi lingkungan, dan publikasi terkait pengelolaan sumber daya laut. Pendekatan ini tidak berfokus pada data numerik, melainkan pada interpretasi terhadap informasi visual dan verbal guna memahami hubungan antara perilaku aktor serta kebijakan yang membentuk praktik *overfishing* sebagai bagian dari permasalahan commons.

1.8.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui analisis langsung terhadap film dokumenter *Seaspiracy* sebagai objek utama penelitian. Data tersebut berupa adegan, dialog, narasi, serta visual yang relevan dengan isu *overfishing* dan eksploitasi sumber daya laut. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi representasi fenomena *overfishing*, termasuk perilaku aktor, bentuk eksploitasi, serta dampak ekologis yang ditampilkan dalam film. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen pendukung yang terdapat dalam film, seperti data statistik,

pernyataan narasumber, serta informasi yang disajikan sebagai bagian dari argumen film, sebagai sumber data yang dapat dianalisis secara kontekstual.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian yang relevan dengan tema *overfishing*, pengelolaan sumber daya laut, dan konsep *Tragedy of The commons*. Selain itu, laporan dari organisasi lingkungan serta publikasi dari lembaga internasional juga digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan representasi dalam film dengan kondisi empiris yang terjadi. Penggunaan berbagai sumber data ini diharapkan dapat meningkatkan validitas penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menjawab rumusan masalah terkait fenomena *overfishing* dalam perspektif teoretis yang digunakan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan fenomena *overfishing* dan representasinya dalam film dokumenter *Seaspiracy*. Data Primer diperoleh melalui observasi terhadap adegan, dialog, narasi, visualisasi, serta informasi yang ditampilkan dalam film *Seaspiracy* sebagai objek utama penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi internasional seperti FAO, artikel akademik, serta sumber literatur lain yang relevan dengan isu *overfishing*, media framing, dan tata kelola sumber daya laut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fenomena

overfishing direpresentasikan dalam media dokumenter. Menurut Sugiyono (2019), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis dokumen, catatan, gambar, maupun karya yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendukung proses analisis secara sistematis.

1.8.7. Analisis Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan media framing untuk memahami bagaimana film dokumenter *Seaspiracy* membangun representasi mengenai isu *overfishing* dan eksploitasi sumber daya laut. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai elemen media yang ditampilkan dalam film, seperti narasi, visual, wawancara, dialog, data statistik, serta pemilihan aktor yang digunakan untuk membentuk konstruksi isu tertentu. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi data dilakukan secara mendalam untuk memahami makna yang terkandung di balik representasi media dan bagaimana media mengarahkan pemahaman audiens terhadap suatu fenomena sosial (Creswell, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi film secara umum, tetapi juga menganalisis bagaimana framing dibangun melalui proses seleksi isu, penekanan aspek tertentu, serta hubungan sebab-akibat yang ditampilkan dalam narasi film (Entman, 1993). Selain itu, interpretasi data juga dilakukan dengan menghubungkan representasi dalam film dengan konsep *Tragedy of The commons* untuk memahami bagaimana eksploitasi sumber daya laut sebagai *global commons* direpresentasikan dalam *Seaspiracy*. Dengan demikian, proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian

ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana media dokumenter membentuk konstruksi dan persepsi publik terhadap isu *overfishing* dalam konteks politik lingkungan global.

1.8.8. Kualitas Data

Dalam rangka menjamin kualitas, keabsahan, dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan strategi verifikasi sumber yang ketat serta menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengandalkan data primer berupa film dokumenter *Seaspiracy* yang dianalisis secara sistematis melalui pendekatan analisis isi, dengan menyeleksi adegan wawancara, dialog, dan narasi visual yang relevan dengan fenomena *overfishing*. Pemilihan unit analisis dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap konsep *Tragedy of The commons*, sehingga data yang digunakan benar-benar mencerminkan fokus penelitian.

Untuk mendukung dan memperkuat analisis, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi lingkungan, serta publikasi dari lembaga internasional yang kredibel dan terverifikasi. Hanya sumber yang memiliki validitas akademik dan dapat dipertanggungjawabkan yang dijadikan rujukan, guna memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan representasi dalam film, tetapi juga selaras dengan kondisi empiris yang didukung oleh literatur. Dengan demikian, melalui kombinasi sumber data yang selektif dan metode analisis yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid,

konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menganalisis fenomena *overfishing* melalui perspektif *Tragedy of The commons*.